

**KEBIJAKAN PEMBAGUNAN EKONOMI DESA RAANA BARU KECAMATAN
MOTOLING BARAT, KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**ANASTASYA ROMPAS
FLORENCE D. J. LENGKONG
NOVVA N. PLANGITEN**

anastasyarompas@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pembagunan ekonomi Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa untuk kebijakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah Desa Raanan Baru yaitu membuat program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal itu dilihat pada program yang dibuat yaitu pembangunan jalan usaha tani untuk meningkatkan pertanian dengan harapan hasil-hasil pertanian jadi dapat didistribusikan ke desa ataupun ke kota dan juga ada pembangunan di bidang air bersih. Selanjutnya pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian termasuk pemberian bantuan pertanian kepada masyarakat petani. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan langsung yang diberikan oleh pemerintah desa Raanan Baru dinilai cukup baik hal ini bisa dilihat adanya kepercayaan dan kepuasan masyarakat mengenai program dan kegiatan yang dilakukan melalui perbaikan saluran air, pembangunan jalan untuk para tani untuk meningkatkan pertanian demi menunjang pembagunan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan, Pembagunan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah (beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya yang ada) harus mampu meanksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang

dan membangun prekonomian daerah (Arsyad, 2010)

Tantangan utama pembangunan adalah untuk memperbaiki kehidupan. Kualitas kehidupan yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi. Namun, kiranya pendapatan bukanlah satu-satunya ukuran kesejahteraan. Hal lain yang tidak kalah penting yang perlu diperjuangkan adalah masalah pendidikan, peningkatan standar kesehatan, nutrisi, pemberantasan kemiskinan, kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya. Namun, patut dicatat bahwa apa yang disebut sebagai “kehidupan yang lebih baik” itu sangat relatif, harus melibatkan nilai-nilai (*values*) dan pengukuran nilai-nilai (*value judgment*). Dengan demikian, dalam terminologi pembangunan terdapat pengukuran nilai

tentang apa yang baik (pembangunan) dan apa yang buruk (keterbelakangan). Akan tetapi, perlu direnungkan pemaknaan “pembangunan” itu sendiri tidak sama bagi setiap orang.

Masyarakat pada dewasa ini tidak lagi diposisikan sebagai beban pembangunan. Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan, tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada peran serta aktif masyarakatnya. Oleh karena setiap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya ditujukan bagi masyarakat itu sendiri. Sudah sewajarnya masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam ikut menentukan arah kebijakan pembangunan.

Di era otonomi saat ini, setiap daerah diberikan kebebasan untuk melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Permasalahannya kini adalah bagaimana daerah tersebut melihat potensi yang mereka miliki bisa memberikan dukungan terhadap pembangunannya. Potensi yang paling penting sebenarnya adalah masyarakat. Namun, bagaimana masyarakat itu diberdayakan, merupakan persoalan lain yang harus diselesaikan.

Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan manfaat agar tiap-tiap daerah bisa membiayai kehidupan daerahnya dengan perolehan hasil daerah baik berupa retribusi daerah, pajak pendapatan serta pendapatan lain-lain. Atas dasar pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keseluruhan daerah sebagai suatu kesatuan wilayah kehidupan maupun kehidupan setiap individu anggota masyarakat karena pelaksanaan pembangunan nasional berada di daerah, maka rencana pembangunan daerah merupakan bagian dari kerangka umum pola pembangunan nasional dan daerah haruslah saling menunjang.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 83 ayat 3 point c dan d dijelaskan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan d) pengembangan teknologi tepat guna; dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Berangkat dari regulasi tersebutlah bahwa pembangunan ekonomi berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kabupaten Minahasa Selatan adalah kabupaten yang di mekarkan pada tahun 2003 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan. Kabupaten Minahasa Selatan memiliki banyak potensi ekonomi di antaranya sektor pertanian, sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan. Peranan setiap sektor ekonomi dalam perekonomian dapat diketahui dari angka distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode tahun 2015- 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan cenderung mengalami percepatan meskipun pada tahun 2015 ke 2016 dan tahun 2017 ke 2018 terjadi perlambatan, adapun beberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu sebesar 6,30 persen (2015); 5,09 persen (2016); 6,53 persen (2017); 6,09 persen (2018); dan 6,10 persen (2019).

Desa Raanan baru menjadi salah satu penyumbang sebagai dapur Indonesia terlebih khusus Sulawesi Utara untuk memenuhi kebutuhan pasar di Sulawesi Utara menjadi suatu kebanggaan untuk bisa membantu pemerintah untuk ketersediaan salah satu komoditi yang sangat diperlukan oleh masyarakat sehari hari. Penghasilan utama masyarakat desa ini berasal dari pertanian, yaitu jagung, kelapa, cengkih, padi, sayur-sayuran, kemiri, vanilli, dan ubi bete. Cabe mereh dan Batang Bawang, serta pembuatan cap tikus adalah komoditi yang di hasilkan oleh Desa Raanan Baru yang

menjadi dampak bagi pembangunan ekonomi desa serta tidak menutup kemungkinan kami akan berekspansi lagi di produk hortikultura lainnya untuk lebih mensejahterakan masyarakat desa Raanan baru. Meskipun demikian yang menjadi faktor penghambat dalam menunjang pembangunan ekonomi desa Raanan Baru yaitu dari keterlibatan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada para petani-petani, padahal jika diberikan bantuan seperti bibit dan alat semprot bagi tanaman bisa mempercepat pertumbuhan tanaman, serta tidak ada arahan dan motifasi kepada masyarakat tentang potensi yang dimiliki desa serta membantu dan mempromosikan cap tikus untuk menunjang pembangunan ekonomi Desa Raanan Baru. Berangkat dari pemikiran diatas peneliti mengangkat judul tentang pembangunan ekonomi Desa Raanan Baru, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan berasal dari kata *policy* secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (*Greek*), yang berarti negara-kota. Dalam bahasa latin kata ini menjadi *politia*, artinya negara. Masuk kedalam bahasa Inggris lama (*Middle English*), kata tersebut menjadi *policie*, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan perintah atau administrasi pemerintah. Menurut Thomas R. Dye kebijakan adalah “*is whatever governments choose to do or not to do*” adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah pemerintah memilih mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja (Mulyadi, 2016:36-37).

Kemudian Friederick mendefenisikan kebijakan sebagai

serangkaian tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Very Londa dan Salmin Dengo, 2017: 8)

Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap - sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), dan pemberantasan kemiskinan absolut (dalam Todaro, 2006:62).

Menurut Soekanto (2005:437), Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan yang terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar terencana, dan bertanggung jawab 13 dalam mencapai tujuan kearah-arah perubahan lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan adil bagi rakyat.

Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Jadi pembangunan ekonomi adalah proses untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian manusia dalam kesehariannya (Rachim, 2015:68)

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan (dalam Rapanna&Sukarno 2017: 1). Menurut Irawan dan Suparmoko, Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (dalam Irawan & Suparmoko, 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2011).

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan Langsung

Menurut Menurut Dunn (2003:106): Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam penelitian ini ditemukan bahwa untuk kebijakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah Desa Raanan Baru yaitu membuat program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal itu dilihat pada program yang dibuat yaitu pembangunan jalan usaha tani untuk meningkatkan pertanian dengan

harapan hasil-hasil pertanian jadi dapat didistribusikan ke desa ataupun ke kota dan juga ada pembangunan di bidang air bersih. Selanjutnya pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian termasuk pemberian bantuan pertanian kepada masyarakat petani. Hal ini tidak terlepas program pembangunan penampungan air desa untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian menjadi efektif karena para masyarakat merasa terbantu dan juga sudah meningkatkan ekonomi keluarga para petani desa Raanan Baru. Pada akhirnya program dan kegiatan pemerintah desa sejauh ini cukup bagus karena terlihat ada beberapa perubahan yang terjadi di Desa Raanan.

2. Kebijakan Tidak Langsung

Menurut Jones (dalam Abidin, 2004: 25) mendefinisikan kebijakan yaitu perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Pada penelitian ini di temukan bahwa kebijakan tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa Raanan Baru terfokus pada pembangunan infrastruktur memiliki perubahan yang baik secara fisik dan non fisik, program fisik berupa perbaikan akses jalan ke desa dan saluran air, drainase, dan pembuatan lampu jalan serta akses jalan kebun-kebun masyarakat. Pemerintah juga memberikan bantuan bibit pertanian pokok kepada masyarakat dan juga bantuan kepada masyarakat kurang mampu pada saat era pandemi. Pemerintah desa juga telah beberapa kegiatan pembinaan untuk kelompok-kelompok perempuan (PKK) usaha-usaha rumahan. Dalam hal pendidikan dan kesehatan disetiap tahun pemerintah harus menganggarkan untuk paud, itu juga untuk kesehatan setiap tahunnya wajib mengadakan posyandu untuk balita maupun lansia dan ibu hamil. Selanjutnya dalam meningkatkan sinergitas antara pemerintah masyarakat dari awal tetap menggunakan tenaga kerja di desa Raanan ini untuk

membuktikan bahwa kami selalu melibatkan masyarakat dalam program pembangunan.

3. Kebijakan Khusus

Menurut Carl Friedrich (dalam Indiahono, 2009 :18) Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Dalam penelitian ini ditemukan kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah desa Raanan Baru yaitu adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pemberdayaan yang dilakukan kepa karang taruna guna dapat meningkatkan jiwa tani mereka hal ini juga dilihat pada peningkatan sektor pertanian desa Raanan Baru, Kemudian pada pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu pada bidang pertanian, lalu pelatihan usaha-usaha kecil, menengah, usaha rumahan. Selanjutnya dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan setiap tahun melakukan agenda MUSRENBANG pemerintah desa Raanan Baru selalu mengundang BPD, perwakilan dari masyarakat, tokoh masyarakat guna untuk menunjang sinergitas antara BPD, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat desa Raanan Baru. Pada akhirnya kinerja pemerintahn desa Raanan Baru dinilai cukup baik dengan memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kebijakan langsung yang diberikan oleh pemerintah desa Raanan Baru dinilai cukup baik hal ini bisa dilihat adanya kepercayaan dan kepuasan masyarakat mengenai program dan kegiatan yang dilakukan melalui perbaikan saluran air,

pembangunan jalan untuk para tani untuk meningkatkan pertanian demi menunjang pembagunan ekonomi masyarakat.

2. Kebijakan tidak langsung pemerintah dalam hal infrastuktur cukup baik yaitu adanya pemberian bantuan bibit pertanian kepada para tani dan juga pembinaan untuk kelompok-kelompok perempuan (PKK) usaha-usaha rumahan demi meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi desa.
3. Kebijakan khusus yang pemerintah lakukan dinilai cukup baik karena masyarakat merasa selalu dilibatkan dalam MUSRENBANG dan juga pemberdayaan kepada karang taruna guna meningkatkan motivasi mereka dalam bertani.

Saran

1. Meningkatkan lagi kepercayaan dan kepuasan masyarakat melalui program-program yang dapat meningkatkan pembagunan ekonomi desa.
2. Memperbaiki beberapa infastruktur yang masih rusak khususnya jalan utama desa dan penambungan yang masih rusak.
3. Mempertahankan pemberdayaan karang taruna yang dinilai dapat peningkatan bisa meningkatkan usaha tani para generasi mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdidin, Z. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Dunn, W. William. 2003. *Analisis kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indiahono, D. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* Yogyakarta: Gava Media
- Irawan & Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Londa, V & Dengo, S. 2017. *Kebijakan Publik*. Manado : Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi. .
- Mulyadi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rachim, A. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Rapanna, P & Zulfikry, S. 2017. *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV
- Sahya, A & Li, S. 2016. *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sondang P. Siagian. 2007. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Alfabeta.
- Todaro, P. & Stephen, S. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten
Minahasa Selatan.